

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan tingginya tingkat kemiskinan berhubungan erat dengan permasalahan pertanian di Indonesia. Menurut Nasution (2008), beberapa masalah pertanian yang dimaksud yaitu sebagian besar petani Indonesia sulit untuk mengadopsi teknologi sederhana untuk meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya. Kemudian, petani mengalami keterbatasan pada akses informasi pertanian sehingga pasar komoditas pertanian menjadi semakin tersudut. Petani juga memiliki kendala atas sumber daya manusia yang dimiliki dan rendahnya pendidikan yang dimiliki petani. Faktor penyebab lainnya adalah pemerintah yang berpihak pada sektor industri dari pada sektor pertanian yang berdampak pada semakin menyempitnya lahan yang dimiliki oleh petani akibat konversi lahan menjadi lahan industri maupun pemukiman. Masalah paling dasar bagi sebagian besar petani Indonesia adalah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para petani.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jhingian (1999) bahwa hambatan yang paling erat berkaitan dengan perkembangan ekonomi juga sama dengan hal di atas yaitu kelangkaan modal. Sebab utama kekurangan modal adalah kecilnya tabungan atau kurangnya investasi di dalam produksi yang mampu menaikkan tingkat pendapatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena pendapatan per kapita rendah, penduduk tidak dapat menabung banyak, sehingga bagian yang tersisa untuk investasi lebih lanjut hanya sedikit. Hal ini mengakibatkan produktivitas masyarakat dalam berusaha menurun.

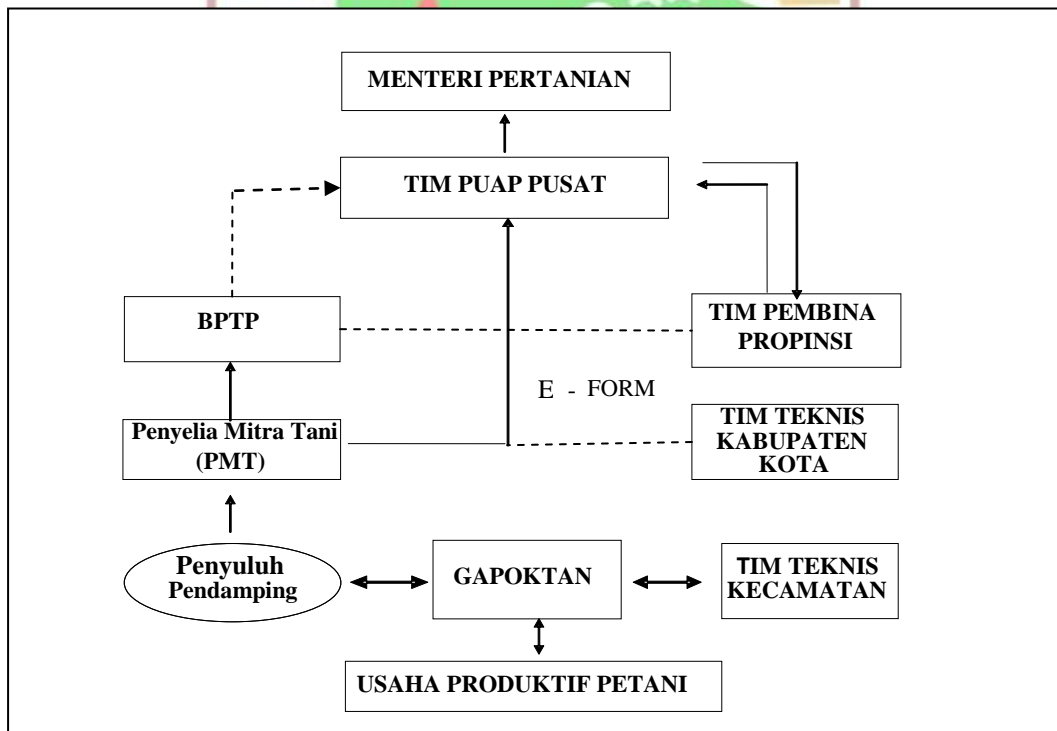
Bertitik tolak pada lemahnya penguasaan modal dan sulitnya masyarakat dalam mengakses permodalan, Pemerintah Republik Indonesia menerapkan satu program yang dinamakan dengan PUAP (Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). PUAP mengalokasikan anggaran penguatan modal untuk pengembangan usaha agribisnis perdesaan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk satu peserta GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani). Salah satu ide dasar pencetus program ini adalah berhasilnya pendekatan Prima Tani yang dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian, dipadukan dengan program P4S. Prima

Tani mendorong pengembangan teknologi dan P4S memicu pertumbuhan swadaya masyarakat. Menurut Daerobi, Hery dan Tetuko. (2007), Prima Tani itu sendiri merupakan program terobosan yang diluncurkan untuk mempercepat proses alih teknologi ke pengguna, dengan sasaran utama peningkatan pendapatan masyarakat melalui penggalan dan pemanfaatan semua potensi perdesaan yang tersedia. Pencapaian sasaran dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan, penerapan teknologi spesifik lokasi yang efektif dan pengembangan industri perdesaan dengan pengawalan dan pembimbingan oleh tim kerjasama.

Pada dasarnya, PUAP dilaksanakan adalah untuk mengatasi permasalahan permodalan dalam pengembangan agribisnis perdesaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan pendapatan petani di perdesaan. Menurut Numanaf (2009), modal merupakan masalah utama yang selalu muncul dalam upaya pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat baik melalui penerapan teknologi maupun melalui penggunaan Inovasi selalu terkendala oleh kelangkaan modal.

Dalam penerapannya, wilayah perdesaan dijadikan sebagai “Laboratorium Agribisnis”, yang nantinya akan berkembang menjadi Desa Industri (Agro Industrial Perdesaan= AIP). Pelaksana Prima Tani adalah para peneliti dan penyuluh BPTP, bekerjasama dengan penyuluh lapang setempat, aparat instansi terkait di Kabupaten dan Propinsi, aparat desa dan pemuka serta pengusaha setempat. Kata kunci dalam pelaksanaan Prima Tani adalah sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pembimbingan berkelanjutan serta fasilitasi kerjasama dan pemasaran. Dalam lima tahun pelaksanaannya di lapangan tahun 2005-2009, umumnya kegiatan Prima Tani diberbagai daerah memperlihatkan hasil yang baik dan berperan besar dalam memacu gerakan pertumbuhan agribisnis yang dimulai di perdesaan. Laporan pelaksanaan dari BPTP (2010) mengemukakan bahwa peningkatan aktivitas agribisnis yang dicirikan oleh peningkatan pendapatan masyarakat pelaku. Perkembangan tersebut telah memicu harapan para pengambil kebijakan untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut secara massal di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2008, kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dimulai dengan alokasi bantuan penguatan modal untuk 10.000 desa yang terintegrasi dengan PNPM-Mandiri. Pelaksanaan program ini dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2007 di Palu. Pada tahun 2010 lalu, ditegaskan kembali bahwa PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. Bantuan diberikan kepada GAPOKTAN yang menghimpun beberapa kelompok tani, dibina oleh Penyuluh Pertanian Lapang dan Penyelia Mitra Tani. Secara Nasional PUAP dilaksanakan oleh Tim Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Pertanian, yang juga ditindaklanjuti oleh para Gubernur dan Bupati/Walikota daerah pelaksana (Departemen Pertanian, 2009). Lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Skema Pelaksanaan dan Tim Pelaksana PUAP Secara Nasional yang Ditetapkan oleh Menteri Pertanian

Menurut Departemen Pertanian RI (2009), sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan PUAP adalah: a) Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin yang terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa ; b) Berkembangnya 10.000 GAPOKTAN yang dimiliki dan dikelola oleh petani ; c) Meningkatnya

kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau peternak (pemilik atau penggarap) skala kecil, buruh tani dan d) Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Indikator keberhasilan *output* PUAP ditetapkan antara lain ; a) Tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM ) PUAP kepada petani, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin anggota GAPOKTAN sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian dan b) Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya manusia pengelola GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping, dan Penyelia Mitra Tani (Departemen Pertanian RI, 2009).

Sementara indikator keberhasilan *outcome* antara lain ; a) Meningkatnya kemampuan GAPOKTAN dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani ; b) Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha ; c) Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya, hilir) di perdesaan dan d) Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah. Sedangkan indikator *benefit* dan *impact* antara lain ; a) Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani dilokasi desa PUAP ; b) Berfungsinya GAPOKTAN sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani dan c) berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan (Departemen Pertanian RI, 2009).

Telah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan telah banyak sistem yang dikembangkan untuk penguatan modal masyarakat, tetapi selalu kandas di tengah jalan. Mulai dari KUT (Kredit Usaha Tani), KCK (Kredit Canda Kulak), Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) dan lain sebagainya. Berbagai hambatan ditemui dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan terutama disebabkan oleh sosialisasi yang kurang efektif baik pada anggota masyarakat yang menjadi sasaran program maupun para pelaksana program itu sendiri. Sebagian besar program tidak mengikutsertakan secara aktif masyarakat luas. Dengan demikian,

banyak ditemukan kasus bahwa program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran baik jenis kegiatan maupun kelompok targetnya (Numanaf, 2009).

Dipropinsi Sumatera Barat, kegiatan PUAP telah dilaksanakan pada tahun 2008, yang mencakup 204 Nagari dan meningkat menjadi 258 Nagari pada tahun 2009. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Sumatera Barat memberlakukan suatu kebijakan daerah yang berbeda dengan pelaksana PUAP lainnya. Kebijakan dimaksud adalah dana bantuan penguatan modal (Rp. 100.000.000,-) yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang merupakan prasyarat pencairan dana bergulir tersebut. Jika LKMA belum dibentuk maka dana penguatan modal belum bisa dicairkan. Tujuannya adalah agar dana yang dialokasikan tersebut lebih bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. LKMA dimaksud merupakan bagian unit usaha dari GAPOKTAN yang bersangkutan (Sekretariat Program PUAP Sumatera Barat, 2010).

Namun, sampai dengan bulan Juni 2010, belum diperoleh laporan hasil pelaksanaan PUAP secara menyeluruh, baik yang berasal dari instansi pelaksana (Dinas Pertanian Tanaman Pangan) maupun Instansi Pendamping (BPTP). Masa operasi LKMA (GAPOKTAN) yang sudah memperoleh dana tersebut sangat bervariasi, delapan bulan sampai lima belas bulan. Pencairan dana PUAP baru terlaksana mulai Oktober 2008-Mei 2009. Sebagai gambaran, dikemukakan dalam laporan Sekretariat Program PUAP Sumatera Barat (2010) tentang Profil GAPOKTAN/LKMA PUAP 2008 dan perkembangan LKMA 2009 seperti pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah dan Sebaran serta Petani Binaan Beberapa LKMA PUAP yang Berkembang di Sumatera Barat Bulan Juni 2010

No	Nama LKMA	Lokasi (Kabupaten)	Petani Binaan (KK)	Jumlah Modal (Rp)	Kel. Tani Binaan
1	Padang Magek Sakato	Tanah Datar	160	98.484.000	11
2	Nandiati	Agam	120	208.148.205	7
3	Tunas Harapan	Lima Puluh Kota	134	139.260.000	11
4	Pesona Gumanti	Kabupaten Solok	132	105.945.000	5
5	Sukma karsa	Pasaman Barat	577	632.943.827	4
6	Sumua Nan Janiah	Sijunjung	90	102.420.000	7
7	Jaya Bersama	Dharmasraya	65	110.000.000	5
8	Gema Nagari	Pesisir Selatan	185	101.705.000	12
9	Sinar Swadaya	Solok Selatan	110	107.320.000	8
10	Maju Bersama	Padang Pariaman	80	102.000.000	4
11	Selamat Mandiri	Pasaman	53	126.000.000	3

Sumber : Sekretariat PUAP Sumatera Barat, Juni 2010.

Laporan Tabel 1 diatas, hanya menggambarkan perkembangan penggunaan dana penguatan modal serta status LKMA penerima. Laporan yang menyangkut substansi program serta perkembangan dan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat belum tersedia. Sedangkan dana PUAP tahun 2009 sampai April 2010 belum cair seratus persen. Fenomena dan kenyataan inilah yang menjadi alasan bahwa pentingnya untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang “Analisis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Nagari Lareh Nan Panjang Kabupaten Padang Pariaman”.

### **B. Perumusan Masalah**

Secara teoritis dan berdasarkan pengalaman pelaksanaan Prima Tani, PUAP yang merupakan lanjutan atau pengembangan Prima Tani Badan Litbang Pertanian ini, diyakini akan mampu mengangkat dan memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena dengan suntikan dana penguatan modal untuk pengembangan usaha di perdesaan maka akan terjadi peningkatan aktivitas agribisnis yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Sumodiningrat, 1996).

Dengan demikian, secara bertahap akan terjadi proses pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Akan tetapi apakah penerapannya di lapangan sudah sesuai dengan rencana (program) dan apakah program tersebut cukup berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat, belum diketahui secara pasti. Sejak diluncurkan pada tahun 2008, sampai saat ini belum diperoleh hasil penelitian/kajian yang mengemukakan perkembangan dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan. Data yang dikemukakan sebelumnya oleh Sekretariat PUAP Sumatera Barat tahun 2010 hanya mengemukakan status LKMA dan perkembangan dana penguatan modal yang telah dialokasikan.

Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman terletak sekitar 13 km dari ibukota Kabupaten dan 60 km dari ibukota Propinsi. Nagari Lareh Nan Panjang adalah Nagari di Kecamatan VII Koto yang memiliki luas 1.500 ha dan memiliki 9 korong dengan topografi datar sedikit berbukit (40-100 dpl). Nagari ini merupakan Agroekosistem Lahan Kering Dataran Rendah Beriklim Basah

(LKDRIB) dengan komposisi 80% lahan kering dan 20% lahan sawah (curah hujan 2500-3000 mm/tahun). Masyarakat Nagari Lareh Nan Panjang pada umumnya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian sebagai petani. Jumlah penduduk yang berjumlah 5.881 jiwa (2.858 jiwa laki-laki dan 3.023 jiwa perempuan serta 1.083 KK). Penduduknya masih berpendidikan rendah (25,6% SD, 35,5% SMP, dan 15,9% SMA, serta 20% lainnya) dan terdapat 327 RTM. Pendapatan per kapita penduduknya sekitar Rp. 4,5 juta per tahun dengan pertumbuhan ekonomi Kecamatan VII Koto sebesar 3,5% per tahun (BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2010).

Menurut Sekretariat PUAP Sumatera Barat (2010), permasalahan petani di Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya adalah keterbatasan dalam mengakses sumber modal makin menguatkan petani mengalami beragam tekanan, baik tekanan ekonomi maupun tekanan sosial. Berdasarkan hasil pengamatan awal penelitian ini dari berbagai laporan pelaksanaan PUAP di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010 diperkirakan bahwa rata-rata modal petani masih tergolong rendah sekitar Rp. 200.000 s/d Rp. 800.000. Disamping itu, tekanan ekonomi juga berhubungan langsung dalam pengadaan sarana produksi meliputi bibit, pupuk maupun obat-obatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, tekanan sosial lebih bersifat kepada penilaian sebagian besar masyarakat di luar petani yang menilai bahwa petani itu terbelakang dan tertinggal karena tidak mempunyai keinginan untuk maju.

Kemunduran dan kemiskinan petani (kemiskinan banyak berada di wilayah perdesaan) ini merupakan akibat dari pendapatan petani di perdesaan semakin menurun. Berdasarkan hasil pengamatan awal penelitian ini dari berbagai laporan pelaksanaan PUAP di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010 terlihat bahwa perbedaan antara pendapatan petani baik sebelum dan sesudah pelaksanaan Program PUAP tidak jauh berbeda sekitar 10% per tahun. Begitu juga dengan data pendapatan peserta PUAP dengan bukan peserta PUAP juga tidak jauh berbeda secara rata-rata Rp. 55.000 atau 2,96%. Akan tetapi, Program PUAP diperkirakan telah mampu membangun kelembagaan kelompok tani dan lembaga keuangan mikro di sektor agribisnis yang sudah berjumlah sekitar 204 kelembagaan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan kajian mengenai

pelaksanaan PUAP dilapangan serta pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan petanidi perdesaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi perbaikan dan tindak lanjut pelaksanaan PUAP kedepan untuk percepatan peningkatan pendapatan petani di perdesaan dengan basis agribisnis.

Berdasarkan latar belakang dan kenyataan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman?
- 2) Bagaimana pengaruh Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan(PUAP) terhadap peningkatan pendapatan petani di Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap peningkatan pendapatan petani di Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada berbagai pihak terkait dan kepentingan yang berbeda-beda, yaitu :

- 1) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan evaluasi dan pengembangan program PUAP dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya dalam meningkatkan pendapatan petani di daerah perdesaan.
- 2) Sebagai bahan rujukan dan referensi tambahan bagi peneliti untuk melakukan kajian sejenis dalam bidang pemberdayaan ekonomi



masyarakat dan implementasi Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan PUAP dalam meningkatkan pendapatan petani di perdesaan.

